

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik lingkungan sekarang ini sudah menjadi agenda politik di dunia internasional. Kondisi ini tidak lepas dari peran kelompok lingkungan yang aktif menyerukan tentang permasalahan lingkungan yang harus mendapat perhatian kalangan politik. Seiring dengan upaya penyadaran pentingnya mengangkat isu lingkungan dalam kancah politik, maka perkembangan kelompok lingkungan turut mengiringi. Sekup kerja kelompok lingkungan tidak hanya pada wilayah regional, nasional tetapi juga internasional. Kelompok lingkungan yang aktivitasnya mendunia, melintas batas negara-negara ini oleh Paul Wapner disebut sebagai *Transnational Environmental Activist Groups (TEAGs)*.¹

Salah satu TEAGs yang besar dan telah banyak menunjukkan kiprahnya di tingkat internasional adalah Greenpeace, yang mana telah berkampanye untuk pelestarian lingkungan sejak tahun 1971.² Saat itu dimulai ketika pemerintahan Amerika Serikat melakukan percobaan bawah tanah senjata nuklir di kawasan Alaska Utara, Greenpeace bersama para wartawan mengekspose kegiatan tersebut yang tadinya bersifat sangat rahasia bagi publik, ini dimaksudkan agar masyarakat sadar akan bahaya kegiatan tersebut dan melakukan penentangan kegiatan tersebut. Inilah yang terus dilakukan oleh Greenpeace dari waktu ke waktu demi menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia.

¹ Ken Conca and Geoffrey D. Dabelko, Editors. *Green Planet Blues*, Third Edition, Westview Press, Cambridge, 2004. p.123.

² www.greenpeaceusa.org, diakses di internet tanggal 22 April 2007.

tahun dan juga meningkatkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis
 dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang tidak hanya sekedar administratif
 melainkan yang bersifat substantif yang meliputi:

1. Menetapkan program penelitian yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan
2. Menetapkan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian
3. Menetapkan sumber data yang akurat dan valid
4. Menetapkan teknik pengolahan data yang sistematis dan objektif
5. Menetapkan cara penyajian data yang menarik dan mudah dimengerti

Kegiatan penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara
 sistematis dan objektif untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid mengenai
 suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan
 mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan menggunakan teknik
 pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap objek
 penelitian yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung dengan informan yang
 dipilih secara sengaja.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen
 yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah
 dikumpulkan ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dimengerti.

Teknik penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data yang telah dianalisis
 ke dalam bentuk-bentuk yang menarik dan mudah dimengerti.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian ini, dapat dilihat pada lampiran
 yang terlampirkan pada akhir buku ini.

Demikianlah laporan ini dibuat dan disajikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
 memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang
 telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Guru yang telah
 memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah
 memberikan dukungan dan semangat selama proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan
 dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
 yang membangun dari Bapak/Ibu pembaca.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat
 bagi perkembangan pendidikan di lingkungan sekolah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah
 membaca laporan ini.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebahagiaan
 dan kesuksesan kepada semua orang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah
 memberikan dukungan dan semangat selama proses penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah
 memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan
 dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
 yang membangun dari Bapak/Ibu pembaca.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat
 bagi perkembangan pendidikan di lingkungan sekolah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah
 membaca laporan ini.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebahagiaan
 dan kesuksesan kepada semua orang.

Kelestarian lingkungan Amerika Serikat tidak hanya menjadi hal yang harus dipikirkan oleh NGO-NGO lingkungan, melainkan juga tugas seluruh elemen masyarakat. Hal ini juga yang menjadikan Greenpeace senantiasa gencar berkampanye mengajak semua elemen masyarakat termasuk pemerintahan di Amerika Serikat untuk terus peduli pada kelestarian lingkungan. Dari sinilah sangat dibutuhkan tindakan yang konstitusional dari pihak pemerintahan AS untuk bisa membuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan. Masukan dari berbagai pihak nampaknya sangat diperlukan pemerintah AS agar bisa merumuskan kebijakan lingkungan yang komprehensif dan tidak memiliki tendensi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Termasuk masukan dari kalangan NGO lingkungan yang ada di AS, yang salah satunya adalah Greenpeace yang telah cukup lama berkiprah dalam usaha pelestarian lingkungan di Amerika Serikat.

Dalam sebuah negara demokratis seperti halnya Amerika Serikat, peran NGO sebagai mediator antara individu dan masyarakat dengan negara sudah seharusnya bisa berjalan secara efektif. Berarti Greenpeace bisa mengambil peran ini dengan sebaik-baiknya, disisi lain pemerintah AS juga harus memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak untuk memberi masukan terbaik demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Greenpeace tidak hanya berupaya memberikan *pressure* pada pemerintah, tapi strategi lain juga harus dijalankan, mengingat tidak serta merta *pressure* yang diberikan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Strategi yang bisa mewujudkan visi dan misi Greenpeace sebagai Gerakan Pelestarian Lingkungan. Berdasarkan informasi tersebut, lebih

jauh penulis ingin meneliti lebih jauh pengaruh kelompok lingkungan hidup terhadap pembentukan kebijakan lingkungan di AS khususnya pada kebijakan pengelolaan laut di wilayah tersebut diatas.

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mempelajari bagaimana pengaruh Greenpeace terhadap pembentukan kebijakan lingkungan di Amerika Serikat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan permasalahan dan penyelesaiannya.
2. Menambah dan meningkatkan minat penelitian skripsi bertemakan politik lingkungan global.

C. Pokok Permasalahan

Bagaimana Greenpeace sebagai Transnational Environmental Activist Group (TEAG) mempengaruhi proses pembentukan kebijakan politik lingkungan di Amerika Serikat dengan studi kasus tentang perlindungan mamalia laut pada ekosistem laut di wilayah *Gulf of Alaska, Bering Sea* dan *Aleutian Islands*?

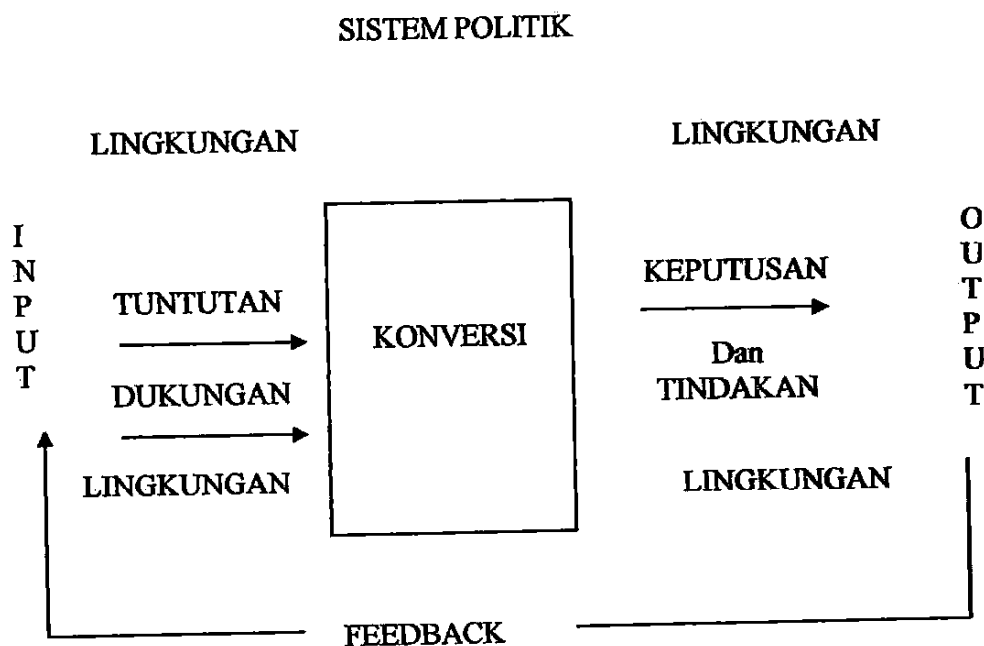
D. Kerangka Berfikir

Dalam membahas tema skripsi ini, penulis mencoba mengkorelasikanya dengan beberapa konsep.

D.1. Model pembentukan Kebijakan “David Easton”

Dalam mengkaji bagaimana pengaruh Greenpeace terhadap pembentukan kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, maka penulis menggunakan model Pembentukan Kebijakan yang dirumuskan oleh David Easton. Model tersebut adalah pada prinsipnya bisa dipakai untuk menganalisa tentang kemunculan suatu kebijakan atau undang-undang dalam suatu negara. Ada empat komponen utama yang membentuk model ini, yaitu, Input, Konversi, Output serta Feedback. Empat komponen tersebut merupakan sebuah kesatuan yang berada dalam sebuah sistem politik.

GAMBAR 1.1
Model Pembentukan Kebijakan David Easton



Sumber : Lihat David Easton, “*An Approach to Political Systems,*” dalam *World Politics*, Vol. 9 (1957), hal. 383-400.

Dari gambar diatas bisa ditarik penjelasan bahwa ada tiga fase dalam pembentukan kebijakan. *Fase pertama* adalah Input dalam bentuk permintaan dan dukungan yang menjadi masukan bagi sistem politik. Input ini bisa berasal dari mana saja, masyarakat, juga dari kelompok elit politik serta kelompok kepentingan. Pada fase ini biasanya diperlukan *berbagai* media yang bisa menjembatani para pemberi masukan dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan. Dalam hal ini salah satu pihak yang cukup berperan adalah LSM/ NGO. LSM atau yang umumnya dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (NGO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini dibentuk sebagai perwujudan komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, bahkan lingkungan. Berkaitan dengan peranan NGO, Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna,⁶ mencoba mengidentifikasi empat peranan NGO dalam sebuah negara, antar lain: (1) *Katalisasi perubahan system*. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan melakukan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. (2) *Memonitor* pelaksanaan system dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. (3) *Memfasilitasi Rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan*. NGO

⁶Tadashi Yamamoto, *Emerging Civil society in The Asia Pacific Region*, joint Publication of JCIE-ISEAS, singapore 1995. hal. 129-130

muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. (4) *Implementasi Program Pelayanan*. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Secara teknis ada poin dari peranan NGO tersebut diatas telah dijalankan oleh Greenpeace. Pengangkatan isu-isu lingkungan demi membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan terus menerus dilakukan Greenpeace. Aksi protes dan juga tindakan advokasi tak jarang dilakukan Greenpeace terhadap kegiatan yang membahayakan manusia dan lingkungannya. Berbagai program pelatihan dan juga kampanye pelestarian lingkungan kerap dilakukan oleh Greenpeace baik di Amerika Serikat ataupun di berbagai negara lainya.

Pihak ini biasanya melayangkan usulan, permintaan dan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung dengan jalan audiensi, ataupun melalui *blow-up* isu melalui media-media yang ada baik cetak ataupun elektronik. Dalam beberapa kasus masukan juga tidak jarang datang dari pemerintah itu sendiri. Masukan model demikian disebut sebagai *withinput*.

Kemudian *fase kedua* adalah proses Konversi. Proses ini dalah tindak lanjut dari permintaan, usulan dan dukungan yang muncul dari berbagai pihak. Pihak yang berwenang melakukan konversi adalah badan negara yang sering disebut sebagai badan legislatif. Badan Legislatif lebih lanjut akan membentuk

tim khusus untuk melakukan kajian terhadap input dilanjutkan dengan persidangan-persidangan oleh komisi-komisi terkait dalam legislatif.

Fase Terakhir adalah Output, yaitu setelah proses konversi telah menghasilkan sebuah kebijakan yang mengakomodir permintaan dan masukan dari lingkungan sistem politik yang ada. Kemudian secara alami kebijakan tersebut akan teruji kembali efektifitasnya dalam masyarakat atau lingkungan sistem politik. Sehingga bukan tidak mungkin hal ini akan memunculkan kembali permintaan, usulan ataupun bahkan dukungan untuk dibentuknya kembali kebijakan yang jauh lebih efektif (proses *Feedback*). Demikian proses pembentukan kebijakan tersebut akan terus berputar sebagai sebuah sistem.

D.2. Konsep Lobby

Sebelum sampai pada pembahasan lebih jauh mengenai skripsi ini, maka penulis berpijak juga pada konsep lobby. Karena konsep ini dimaksudkan agar bisa menjadi dasar sistematika dalam menjawab tentang upaya lobby yang dilakukan Greenpeace dalam upaya mempengaruhi kebijakan lingkungan di Amerika Serikat.

Kata *Lobby* merupakan istilah yang digunakan di Amerika Serikat bagi *pressure group* yang diambil dari kenyataan bahwa selama bertahun-tahun arena utama bagi kegiatan kelompok penekan adalah lobby di depan ruang

legislative di mana mereka mereka dengan mudah bisa menghubungi para legislator pada saat keluar masuk.⁷

Menurut sebuah definisi, lobby merupakan “kelompok orang-orang yang mempunyai sikap yang sama dan diorganisasi untuk memperoleh beberapa tujuan politik.”⁸ Lobby merupakan sarana sah untuk mengekspresikan kekuasaan atau kekuatan politik dan pengaruh, juga merupakan instrumen utama disamping partai politik bagi perjuangan untuk kekuasaan politik sebagaimana dikatakan oleh Huckshorn :

*Politics is the organized struggle for political power, and it determines the ends to which power be used. In democracies, the main instrument of this struggle are political parties and interest groups. Both of these institutions offer the citizen a legitimate means of expression in exercise of political power and influence.*⁹

Dengan konsep di atas maka posisi Greenpeace bisa dijelaskan sebagai *interest group* yang memiliki hak dan legitimasi yang berhak untuk melakukan lobby terhadap pemerintah Amerika Serikat. Dengan maksud agar bisa mempunyai pengaruh pada kebijakan pemerintah sehingga kepentingannya terakomodasi.

⁷ Harwanto Dahlan, Modul Kuliah: *Politik dan Pemerintah Amerika*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 1993. hal. 69.

⁸ David C. Saffell, *The Politics of American National Government* (Boston: Little, Brown & Co., 1984). P. 124.

⁹ Robert J. Huckshorn, *Political Parties in America*, 2nd ed, (Monterey, Ca. : Brooks/ Cole Publishing Co., 1984), p. 170

E. Hipotesa

Berdasarkan teori serta latar belakang diatas dapat ditarik hipotesa bahwa Greenpeace memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan lingkungan yang melindungi mamalia laut pada ekosistem laut di wilayah *Gulf of Alaska, Bering Sea* dan *Aleutian Islands* di Amerika Serikat, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Lobby*
2. Meningkatkan Kepekaan Ekologis (*Disseminating Ecological Sensibility*).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data sekunder, yaitu data yang tersedia pada buku-buku ataupun majalah, media massa termasuk internet dan literatur lain yang sesuai.

G. Jangkauan Penulisan

Dengan maksud agar pembahasan tidak terlalu meluas dan penyelesaiannya menjadi lebih konkret, maka penulis akan membahas seputar permasalahan keberadaan Greenpeace sebagai TEAGs dan pengaruhnya dalam Politik Lingkungan di Amerika Serikat pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir (1997-2007). Upaya Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga dalam rentang waktu

diatas (1997-2007) hanya tercatat beberapa keberhasilan Greenpeace. Oleh karena itu, demi pembahasan yang lebih fokus maka jangkauan penulisan ini juga terbatas pada analisa keberhasilan Greenpeace mempengaruhi kebijakan lingkungan bidang kelautan, yaitu tentang perlindungan ekosistem laut seperti perlindungan pada singa laut dan biota laut lainnya serta pengelolaan hasil laut di wilayah *Gulf of Alaska*, *Bering Sea* dan *Aleutian Islands*, Amerika Serikat.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penulisan, rumusan permasalahan, kerangka berpikir, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang elaborasi dari latar belakang masalah skripsi ini berupa proses pembuatan kebijakan di AS serta melihat kedudukan kelompok kepentingan dalam proses tersebut.

BAB III Membahas tentang Sejarah Greenpeace sebagai TEAGs dan kiprahnya dalam menjalankan aktifitasnya yang berpengaruh pada pembentukan kebijakan lingkungan di AS, serta sekilas tentang profil salah satu TEAGs lain sebagai pembanding.

BAB IV Mengungkapkan lebih lanjut tentang pengaruh Greenpeace dalam pembentukan kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, khususnya kebijakan

tentang perlindungan ekosistem laut termasuk mamalia laut di wilayah *Gulf of Alaska, Bering Sea* dan *Aleutian Islands*.

BAB V Penutup. Penulis mencoba mengambil kesimpulan dari seluruh uraian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.